

**PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PERMASALAHAN TUMPANG  
TINDIH LAHAN AKIBAT SERTIFIKAT GANDA (STUDI: KAMPUNG  
LENGKUAS KECAMATAN BINTAN TIMUR)**

**Oleh  
Anis Retno Triana  
NIM.2105040052**

**Abstrak**

Permasalahan sengketa tanah yang disebabkan oleh tumpang tindih sertifikat dan ketidakakuratan data administrasi pertanahan merupakan isu krusial di Indonesia, khususnya di wilayah Kampung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur. Permasalahan ini muncul akibat lemahnya pengelolaan data tanah, proses jual beli yang tidak sesuai prosedur, serta adanya oknum yang menjual tanah yang sama kepada pihak berbeda, sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya sertifikat ganda, serta mengkaji proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme non-litigasi yang dilakukan oleh kelurahan, kecamatan, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus dengan metode kualitatif, berupa wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab sengketa adalah lemahnya verifikasi data administratif dan praktik jual beli yang tidak transparan. Proses penyelesaian sengketa diupayakan melalui mediasi yang melibatkan pemerintah desa dan kecamatan secara berjenjang, disertai rujukan ke prosedur resmi BPN jika mediasi gagal. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sistem administrasi pertanahan, digitalisasi data tanah, serta peningkatan kapasitas aparat dalam mengelola sengketa tanah agar konflik serupa dapat diminimalisasi di masa mendatang.

**Kata Kunci:** Sengketa, Pertanahan, Penyelesaian, Sengketa, Mediasi

***DISPUTE RESOLUTION REGARDING OVERLAPPING LAND PROBLEMS  
DUE TO MULTIPLE CERTIFICATES (STUDY: LENGKUAS VILLAGE,  
BINTAN TIMUR DISTRICT)***

**By  
Anis Retno Triana  
NIM.2105040053**

***Abstract***

*Land disputes caused by overlapping certificates and inaccurate land administration data are a crucial issue in Indonesia, particularly in the Lengkuas Village area of East Bintan District. This problem arises from weak land data management, improper purchase and sale processes, and the presence of individuals selling the same land to different parties, resulting in prolonged conflict. The purpose of this study is to analyze the factors causing duplicate certificates and to examine the dispute resolution process through non-litigation mechanisms carried out by village, sub-district, and National Land Agency (BPN) governments. The approach used is a case study with qualitative methods, including interviews, observations, and document studies. The results indicate that the main factors causing the disputes are weak verification of administrative data and non-transparent purchase and sale practices. The dispute resolution process is attempted through mediation involving village and sub-district governments in a hierarchical manner, with referral to official BPN procedures if mediation fails. The conclusion of this study emphasizes the importance of strengthening the land administration system, digitizing land data, and increasing the capacity of officials in managing land disputes so that similar conflicts can be minimized in the future.*

*Keyword; Dispute, Land, Settlement, Dispute, Mediation*